



KEBIJAKAN UTANG PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM: ANTARA KEBUTUHAN NEGARA DAN PRINSIP KEADILAN ANTAR GENERASI

Deswita Lestari Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Balqis Nurul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Reihansyah Azdi Bintang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: Deswitalestari0812@gmail.com, Balqisnurul682@gmail.com,
Rehanbintang000@gmail.com

Abstrak. *Public debt is one of the important instruments in state financing; however, its implementation must consider intergenerational justice, particularly from the perspective of Islamic economics. This article discusses how public debt policy can balance the urgent needs of the state for development with the principle of justice that prevents excessive burdens on future generations. By referring to Sharia principles, such as the prohibition of riba (usury), transparency, and efficient use of resources, this study emphasizes the importance of productive and sustainable public debt. The findings indicate that the implementation of Sharia-compliant financial instruments, careful fiscal management, and long-term planning are key to aligning the state's development needs with moral responsibility toward future generations. This approach is expected to provide guidance for formulating fiscal policies that are fair, sustainable, and in accordance with the values of Islamic economics.*

Keywords: *public debt, Islamic economics, intergenerational justice, fiscal policy, sustainable development*

Abstrak. Utang publik merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara, namun penggunaannya harus mempertimbangkan aspek keadilan antar generasi, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan utang publik dapat menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak negara untuk pembangunan dan prinsip keadilan yang mencegah beban berlebihan bagi generasi masa depan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya, penelitian ini menekankan pentingnya utang publik yang produktif dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan instrumen keuangan syariah, pengelolaan fiskal yang hati-hati, dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan negara dengan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perumusan kebijakan fiskal yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata kunci: *utang publik, ekonomi Islam, keadilan antar generasi, kebijakan fiskal, pembangunan berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Utang publik merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal modern yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan, menutupi defisit anggaran, serta menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks ekonomi konvensional, utang publik dipandang sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, penggunaan utang publik menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap generasi mendatang, karena beban utang yang berlebihan dapat memengaruhi kemampuan negara di masa depan. Dalam perspektif ekonomi Islam, utang publik bukan hanya dipandang dari sisi kebutuhan fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan finansial, termasuk utang, tidak boleh menimbulkan ketidakadilan antar generasi. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid al-syariah, yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan umat secara menyeluruh, termasuk generasi yang akan datang.¹

Kebijakan utang publik dalam ekonomi Islam harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak negara untuk membiayai pembangunan dan kewajiban moral untuk tidak memberatkan generasi berikutnya. Utang yang digunakan secara tidak bijak dapat menimbulkan risiko inflasi, ketergantungan finansial, dan penurunan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan Islam mendorong pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara efisien, mengutamakan pendapatan yang halal, dan meminimalkan utang yang menimbulkan unsur riba atau ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Selain itu, konsep keadilan antar generasi dalam ekonomi Islam menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan utang publik. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan fiskal yang diambil tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi generasi mendatang. Prinsip ini menuntut transparansi dalam perencanaan anggaran, penggunaan utang yang produktif, dan evaluasi risiko jangka panjang, sehingga utang publik dapat berfungsi sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.²

Secara praktis, implementasi kebijakan utang publik yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak, dan keterbatasan sumber daya domestik. Pemerintah dituntut untuk menemukan strategi yang inovatif, seperti penggunaan instrumen keuangan syariah, kemitraan publik-swasta, atau optimalisasi sumber daya lokal, agar kebutuhan fiskal terpenuhi tanpa melanggar prinsip keadilan antar generasi. Kajian tentang kebijakan utang publik dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk menjembatani antara kebutuhan negara dan prinsip keadilan antar generasi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan finansial yang diambil tidak mengorbankan hak-hak generasi mendatang. Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan agar kebijakan utang publik dapat diterapkan secara bijak, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan syariah.

¹ Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS, 2025, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Rafikatama, Jambi

² Fatkhur Rohman Albanjari, 2023, *Lembaga Keuangan Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian difokuskan pada analisis kebijakan utang publik dari perspektif ekonomi Islam, melalui pengumpulan dan telaah literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan fatwa atau panduan terkait prinsip syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, untuk mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan negara dalam pembiayaan publik dan prinsip keadilan antar generasi. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana kebijakan utang publik dapat disusun sesuai nilai-nilai ekonomi Islam, serta mengevaluasi implikasi sosial, ekonomi, dan moralnya bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Utang Publik dalam Ekonomi Islam: Antara Kebutuhan Negara dan Prinsip Keadilan Antar Generasi

Utang publik merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal modern yang digunakan negara untuk membiayai pembangunan, menutup defisit anggaran, dan menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil. Dalam perspektif ekonomi konvensional, utang publik sering dianggap sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Namun, penggunaan utang publik juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait tanggung jawab pemerintah terhadap generasi mendatang, karena beban utang yang berlebihan dapat menimbulkan risiko sosial dan ekonomi di masa depan. Dalam ekonomi Islam, kebijakan utang publik tidak hanya dilihat dari kebutuhan fiskal semata, tetapi juga harus sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam semua urusan, termasuk keuangan, sebagaimana firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

(“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.” – QS. Al-Maidah:

1)

Ayat ini menekankan pentingnya menepati komitmen dan tanggung jawab, termasuk dalam urusan utang dan kontrak keuangan publik.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman terkait kewajiban membayar hutang:

«مَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِعَهْدٍ فَلْيُؤَدِّهِ»

(“Barangsiapa mengambil sesuatu dengan perjanjian, hendaklah dia menunaikannya.” – HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa utang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak merugikan pihak manapun, termasuk generasi yang akan datang.

Dalam konteks negara, utang publik seringkali menjadi kebutuhan mendesak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial. Namun, ekonomi Islam mengingatkan bahwa penggunaan utang harus seimbang dengan prinsip keadilan antar generasi, agar beban finansial tidak jatuh secara tidak adil pada masyarakat di masa depan. Prinsip keadilan antar generasi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan tanggung jawab moral saat ini untuk tidak memberatkan generasi mendatang. Hal ini selaras dengan konsep *maslahah* (kepentingan umum) dan *adl* (keadilan). Negara dituntut untuk merencanakan pengelolaan utang publik secara hati-

hati, transparan, dan efisien agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang.³

Ekonomi Islam melarang praktik riba atau bunga yang memberatkan. Utang publik yang mengandung unsur riba dapat melanggar prinsip syariah dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

(“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” – QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan fiskal yang adil dan tidak membebani generasi masa depan.

Implementasi utang publik yang sesuai prinsip ekonomi Islam juga harus memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Penggunaan utang sebaiknya diarahkan untuk investasi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk konsumsi jangka pendek. Dengan demikian, utang publik dapat menjadi instrumen yang bermanfaat tanpa menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang berat bagi generasi mendatang. Pendekatan ekonomi Islam juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang publik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثْقَنَهُ»

(“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia menyempurnakannya.” – HR. Al-Baihaqi)

Prinsip ini mendorong pemerintah untuk menggunakan utang secara optimal, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Selain itu, instrumen utang publik berbasis syariah, seperti sukuk, dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara tanpa melanggar prinsip keadilan dan larangan riba. Penggunaan instrumen ini memungkinkan negara memperoleh dana yang halal dan produktif, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan adil antar generasi.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, keadilan antar generasi, dan kebutuhan fiskal negara, kebijakan utang publik dalam ekonomi Islam menjadi suatu pendekatan yang seimbang antara urgensi pembangunan saat ini dan tanggung jawab moral terhadap masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan setiap keputusan finansial mendukung keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Prinsip Keadilan Antar Generasi dalam Pengelolaan Utang Publik

Pengelolaan utang publik menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, terutama untuk membiayai pembangunan dan menutupi defisit anggaran. Namun, kebijakan ini tidak hanya menyangkut kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Keadilan antar generasi menjadi prinsip utama yang perlu diterapkan agar utang publik tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat di masa depan. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan finansial, termasuk

³ Dr. Hj. Darmawati, 2021, M.Hum, Etika Keuangan Publik Islam, Bening Media Publishing, Palembang

⁴ Dela Sekar Diani, Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur, Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Volume 2, Number 4, Desember 2025

pengelolaan utang publik. Allah SWT menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

(“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil.” – QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menekankan bahwa keadilan adalah amanah yang harus dijaga, termasuk dalam kebijakan fiskal yang berdampak lintas generasi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam setiap transaksi dan kewajiban finansial:

«مَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِعَهْدٍ فَلْيُؤَدِّهِ»

(“Barangsiapa mengambil sesuatu dengan perjanjian, hendaklah ia menunaikannya.” – HR. Abu Dawud)

Dalam konteks utang publik, hadis ini menekankan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab atas setiap pinjaman yang diambil, agar tidak memberatkan generasi berikutnya.⁵

Prinsip keadilan antar generasi menuntut agar setiap keputusan terkait utang publik mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Beban utang yang tidak terkendali dapat membatasi kemampuan generasi mendatang untuk mengembangkan perekonomian, membiayai pelayanan publik, atau memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, perencanaan fiskal harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan lintas generasi. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan utang publik juga harus bebas dari praktik riba atau bunga yang memberatkan. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

(“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” – QS. Al-Baqarah: 275)

Larangan riba ini menegaskan bahwa utang publik yang mengandung bunga tinggi berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi generasi mendatang.

Keadilan antar generasi juga terkait dengan pemanfaatan utang untuk investasi produktif, bukan konsumtif. Utang publik harus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, generasi mendatang memperoleh manfaat dari kebijakan utang yang diambil hari ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan utang publik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثَقَّنَهُ﴾

(“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia menyempurnakannya.” – HR. Al-Baihaqi)

Prinsip ini mendorong pemerintah untuk mengelola utang publik secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan generasi mendatang.⁶

Instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, dapat menjadi solusi dalam pengelolaan utang publik yang adil dan berkelanjutan. Penggunaan instrumen ini memungkinkan negara memperoleh pembiayaan yang halal dan produktif, sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa membebani generasi mendatang secara tidak adil.

⁵ Yoga Permana, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024

⁶ Malikul Hafiz Alamsyah, Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 (June, 2020), pp. 62 t 81

Pendekatan ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan tanggung jawab terhadap masa depan. Prinsip keadilan antar generasi dalam pengelolaan utang publik merupakan landasan penting dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan etis. Integrasi antara kebutuhan pembangunan saat ini dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang akan memastikan bahwa setiap keputusan finansial tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat lintas generasi sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁷

Strategi Implementasi Kebijakan Utang Publik yang Berbasis Syariah

Utang publik merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan, menutupi defisit anggaran, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam praktik konvensional, utang publik sering disertai bunga yang dapat menimbulkan beban finansial bagi negara di masa mendatang. Hal ini menuntut adanya alternatif pengelolaan utang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip etika ekonomi, salah satunya melalui penerapan prinsip syariah. Ekonomi Islam menawarkan kerangka pengelolaan utang publik yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Utang yang berbasis syariah tidak hanya difokuskan pada kebutuhan fiskal jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap generasi mendatang. Dengan demikian, kebijakan utang publik dapat menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan.⁸

Salah satu prinsip utama dalam utang publik berbasis syariah adalah larangan riba. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

(“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” – QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk merancang instrumen utang yang halal dan tidak memberatkan masyarakat maupun generasi mendatang.⁹

Instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, menawarkan alternatif pembiayaan publik yang sesuai prinsip Islam. Sukuk memungkinkan pemerintah memperoleh dana dari investor dengan sistem bagi hasil atau aset yang produktif, bukan bunga tetap. Pendekatan ini memastikan bahwa utang publik digunakan secara produktif dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan negara. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam implementasi utang publik syariah. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَّهُ»

(“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia menyempurnakannya.” – HR. Al-Baihaqi)

Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan utang publik yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi implementasi utang publik berbasis syariah juga menuntut perencanaan fiskal jangka panjang yang matang. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan dana utang diarahkan untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur,

⁷ Aris Nurul Muiz, Analisis Kebijakan Utang Dalam Negeri Dan Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam, TARAADIN, Vol. 5 No. 1 September 2024 hal. 37 – 62

⁸ Farhan Hardiansyah, 2022, Utang Negara Menurut Syariah: Batasan, Prinsip, Dan Kebijakan Yang Berkeadilan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

⁹ Suharyono, S.E.I., M.E, 2023, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Historis Dan Praktik Kebijakan Dalam Ekonomi, Literasi Bangsa, Yogyakarta

pendidikan, dan kesehatan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga oleh generasi mendatang. Optimalisasi sumber daya domestik menjadi aspek penting dalam strategi ini. Dengan memaksimalkan pendapatan internal negara, ketergantungan pada utang publik dapat diminimalkan, sehingga risiko pembiayaan melalui utang yang berlebihan dapat dihindari. Strategi ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan efisiensi, kemandirian, dan keberlanjutan pembangunan.¹⁰

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi bagian dari strategi implementasi kebijakan utang berbasis syariah. Melalui kemitraan publik-swasta, pemerintah dapat memanfaatkan modal swasta untuk proyek-proyek produktif tanpa menimbulkan beban riba. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penerapan utang publik berbasis syariah juga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat. Lembaga pengawas syariah dapat memastikan bahwa setiap instrumen dan kebijakan utang publik sesuai dengan prinsip syariah, amanah, dan tidak merugikan masyarakat maupun generasi yang akan datang. Pengawasan ini menjadi jaminan bahwa kebijakan utang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Strategi implementasi kebijakan utang publik yang berbasis syariah menawarkan pendekatan yang berkelanjutan, adil, dan produktif. Kebijakan ini mengintegrasikan kebutuhan fiskal negara dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan setiap penggunaan utang memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan saat ini tanpa membebani generasi mendatang. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan utang publik yang etis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan lintas generasi.¹¹

KESIMPULAN

Kebijakan utang publik dalam perspektif ekonomi Islam menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan negara untuk membiayai pembangunan dan prinsip keadilan antar generasi. Utang publik harus digunakan secara produktif dan transparan, mengutamakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas riba dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk merencanakan penggunaan utang secara hati-hati, memastikan bahwa keputusan finansial saat ini tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi generasi mendatang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi, kebijakan utang publik dapat menjadi alat strategis untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya domestik, memanfaatkan instrumen keuangan syariah, dan menerapkan perencanaan fiskal jangka panjang agar utang publik tidak menimbulkan risiko sosial maupun ekonomi di masa depan. Secara keseluruhan, integrasi antara kebutuhan fiskal dan prinsip ekonomi Islam akan menghasilkan kebijakan utang publik yang adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat lintas generasi.

¹⁰ Dicky Riyan Ramadhan, Apakah Indonesia Sedang Bergantung? Analisis Kebijakan Utang Pemerintah Dalam Perspektif Syariah, *Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol. 25 No. 1 Tahun 2025

¹¹ Farhadi Arifiansyah, Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, Vol 02 No 01, 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Nurul Muiz, Analisis Kebijakan Utang Dalam Negeri Dan Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam, TARAADIN, Vol. 5 No. 1 September 2024 hal. 37 – 62
- Dela Sekar Diani, Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur, Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Volume 2, Number 4, Desember 2025
- Dicky Riyan Ramadhan, Apakah Indonesia Sedang Bergantung? Analisis Kebijakan Utang Pemerintah Dalam Perspektif Syariah, Neraca Manajemen, Ekonomi Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
- Dr. Hj. Darmawati, 2021, M.Hum, Etika Keuangan Publik Islam, Bening Media Publishing, Palembang
- Farhadi Arifiansyah, Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Jounal Of Islamic Banking And Shariah Economy, Vol 02 No 01, 2022
- Farhan Hardiansyah, 2022, Utang Negara Menurut Syariah: Batasan, Prinsip, Dan Kebijakan Yang Berkeadilan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta
- Fatkhur Rohman Albanjari, 2023, Lembaga Keuangan Syariah, Media Sains Indonesia, Bandung
- Malikul Hafiz Alamsyah, Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 (June, 2020), pp. 62 t 81
- Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS, 2025, Ekonomi dan Keuangan Islam, Rafikatama, Jambi
- Suharyono, S.E.I., M.E, 2023, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Historis Dan Praktik Kebijakan Dalam Ekonomi, Literasi Bangsa, Yogyakarta
- Yoga Permana, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024